

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR KECAMATAN PAMEKASAN

Mohammad Herman Djaja

(Dosen Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan)

Abstrak: Penelitian ini menggambarkan tentang efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung terhadap anggaran berbasis kinerja kantor Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan perbandingan rasio efektifitas penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2009 menunjukkan bahwa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%. Kemudian perbandingan rasio efektifitas penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2010 menunjukkan bahwa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%. Selanjutnya kontribusi belanja langsung terhadap total belanja anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2009 dan tahun 2010 ada sebagian kegiatan yang perlu dilakukan penambahan antara lain sebagai berikut Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan

Abstract: This research illustrates the effectiveness of the use of direct budgetary towards performance-based budgeting at pamekasan subdistrict office, Regency of Pamekasan. Based on the ratio comparation of the budgetary utilization effectiveness at Pamekasan subdistrict Office in 2009 showed that the Program of Office Administrative Services, Program of Facilities and Infrastructure Apparatus Improvement. Program of

Apparatus Resource Capacity Improvement, Program Intensify the Society Complaint Handling, Program of Planning New Autonomous Region, Programs of District Administrative Services said effective according to the effectiveness ratio reaching 100%. Then the ratio comparison of the budgetary utilization effectiveness at Pamekasan subdistrict Office in 2010 showed that Program of Office Administrative Services, Program of Facilities and Infrastructure Apparatus Improvement. Program of Apparatus Resource Capacity Improvement, Program Intensify the Society Complaint Handling, Program of Planning New Autonomous Region, Programs of District Administrative Services said effective according to the effectiveness ratio reaching 100%. Next, direct expenditure contribution to expenditure budget total at Pamekasan subdistrict Office in 2009 and in 2010 there are some activities that are necessary to be done the increase , among others, as follows: Program of Facilities and Infrastructure Apparatus Improvement, Program of Apparatus Resource Capacity Improvement, Program Intensifies the Society Complaint Handling, Program of Planning New Autonomous Region, Program of District Administrative Services.

Kata Kunci: Belanja Langsung, Anggaran Berbasis Kinerja

PENDAHULUAN

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas.

Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan /program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Mardiasmo¹ mendefinisikan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan perencanaan yang dikembangkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan tanggung jawabnya kepada publik, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat ukur dan tanggung jawab kinerja pemerintah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan

¹Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 61.

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah".

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segala program dan kegiatan pemerintah dapat dilaksanakan karena merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Jika kita dapat mengukur, kita dapat mengawasi, mengatur dan memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja yang efektif dapat memberikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang berkelanjutan.

Pengertian Kinerja adalah sebagai berikut:

"Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika".

Dalam konteks organisasi pemerintah, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Menurut pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun anggarannya dalam bentuk anggaran kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Melalui proses anggaran kinerja ini, pemerintah dapat:

- a. Mengidentifikasi *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh program dan pelayanan mereka.
- b. Menetapkan target pencapaian *output* dan *outcome*.
- c. Mengaitkan biaya dengan hasil yang diinginkan dan proses perencanaan strategies.

Anggaran kinerja akan dibuat berdasarkan Renstra (Rencana Strategi) yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Renstra akan menguraikan strategi dan prioritas program serta mencerminkan visi dan misi Walikota atau Bupati. Anggaran harus bisa merencanakan anggarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tingkat prioritas tiap pekerjaan, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai dengan indikator penilaian yang jelas dan dapat diukur sehingga diukur dengan tingkat efisiensi dan efektivitas dari tiap jenis pelayanan. Dengan anggaran kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara *input*, *output*, dan *outcome* yang akan mendukung tercapainya sistem pemerintahan yang baik.

Penyusun Anggaran Berbasis Kinerja yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya.

Perolehan data kuantitatif bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi dan pemahaman berbagai program yang menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan.
- b. menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis. Berdasarkan data kuantitatif tersebut dilakukan pemilihan dan prioritas program yang melibatkan tiap level dari manajemen pemerintahan.

Metode Penelitian

Untuk melakukan perhitungan Analisa Standar Biaya, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam penghitungan ASB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Perhitungan Analisa Standar Biaya tidak dapat distandarisasi antara propinsi/ kabupaten / kota dengan propinsi/kabupaten/kota lainnya karena standarisasi harga antara suatu tempat dengan tempat lainnya dapat berbeda. Misalnya harga obat di Jawa Barat dengan Papua sangat berbeda. Demikian juga, tarif perjalanan dinas, honor-honor dll dapat berbeda antara Jawa Barat dan Papua. Secara ringkas dari uraian tersebut di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja disusun harus ada keterkaitan tahapan secara menyeluruh.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dimulai dengan menetapkan renstra yang menjelaskan visi, misi dan tujuan dari unit kerja, serta pendefinisian program yang hendak dilaksanakan beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Selanjutnya ditetapkan rencana kinerja tahunan yang mencakup tujuan/sasaran, program, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Penetapan target kinerja pada program terlihat dari indikator outcome, sedangkan penetapan target kinerja kegiatan terlihat dari indikator output nya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tugas pokok dan fungsi (pelayanan, pemeliharaan, administrasi umum) dan kegiatan dalam rangka belanja investasi. Menghitung besarnya alokasi anggaran pada setiap kegiatan dimulai dengan menganalisis beban kerja pada setiap kegiatan. Analisis beban kerja dan perhitungan biaya per unit menggunakan indikator efisiensi dan input sebagai dasar dari perhitungan standar biaya. Lingkup pengalokasian anggaran dan perhitungan total biayanya merupakan suatu Analisa Standar Biaya.

PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian pada dasarnya adalah ingin mendapatkan data obyektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif dengan jenis data sekunder.

Teknik analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsir data yang diperoleh dari laporan. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan atau mengubah kedalam bentuk yang lebih sederhana untuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Data laporan keuangan dalam bentuk Laporan Target dan Realisasi anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dianalisis untuk mengetahui tentang efektivitas anggaran belanja langsung serta kontribusinya terhadap total belanja. Penulis melakukan pengelolaan data sebagai berikut :

Analisis efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung.

Efektivitas penggunaan anggaran langsung yaitu perbandingan antara penerimaan belanja langsung dengan target yang ditetapkan atas belanja langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan belanja langsung}}{\text{Target penerimaan belanja langsung}} \times 100\%$$

Interpretasi kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1
RASIO EFEKTIVITAS

Rasio efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup efektif
60 % - 80 %	Kurang efektif
< 60 %	Tidak efektif

Berdasarkan rumus tentang Efektivitas penggunaan anggaran langsung yaitu perbandingan antara penerimaan belanja langsung dengan target yang ditetapkan atas belanja langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan belanja langsung}}{\text{Target penerimaan belanja langsung}} \times 100$$

Tabel 2
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
KANTOR KECAMATAN PAMEKASAN TAHUN 2009

N O	URAIAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET	HASIL PER- HITUNGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.398,365,500.,	Rp.398,365,500.,	100 % (Efektif)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.206,477,400.,	Rp.206,477,400.,	100 % (Efektif)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 25,500,000.,	Rp. 25,500,000.,	100 % (Efektif)
4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp.16,000,000.,	Rp.16,000,000.,	100 % (Efektif)
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 4,000,000.,	Rp. 4,000,000.,	100 % (Efektif)
6	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Rp 141,000,000.,	Rp 141,000,000.,	100 % (Efektif)

Sumber : Kantor Kecamatan Pamekasan (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2 memberikan gambaran bahwa efektifitas penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%

5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
6. Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%

Analisis penggunaan anggaran langsung dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Kontribusi belanja langsung adalah sumbangan dari penerimaan belanja langsung terhadap belanja total.

$$\text{Kontribusi belanja langsung} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = realisasi penerimaan belanja langsung.

Y = realisasi penerimaan total belanja

Tabel 3
KRITERIA KINERJA ANGGARAN

Prestasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10,00 %	Sangat kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Cukup
30,01 – 40,00 %	Sedang
40,01 – 50,00 %	Baik
> 50,01 %	Sangat baik

Tabel 4
KONTRIBUSI BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN KANTOR KECAMATAN PAMEKASAN TAHUN 2009

N O	URAIAN	BELANJA LANGSUNG (X)	TOTAL BELANJA (Y)	HASIL PER- HITUNGA N
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 398,365,500.,	Rp. 791,342,900.,	50 % (Baik)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 206,477,400.,	Rp. 791,342,900.,	26 % (Cukup)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp. 25,500,000.,	Rp. 791,342,900.,	3 % (S.Kurang)

	Aparatur			
4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 16,000,000.,	Rp. 791,342,900.,	2 % (S.Kurang)
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 4,000,000.,	Rp.791,342,900.,	0,5 % (S.Kurang)
6	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Rp. 141,000,000.,	Rp.791,342,900.,	17 % (Kurang)

Sumber : Kantor Kecamatan Pamekasan (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4 memberikan gambaran bahwa kontribusi belanja langsung terhadap total belanja anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 50 % hal ini menunjukkan baik
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 26 % hal ini menunjukkan cukup
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 3 % hal ini menunjukkan sangat kurang
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah sebesar 2 % hal ini menunjukkan sangat kurang
5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru adalah sebesar 0,5 % hal ini menunjukkan sangat kurang
6. Program Pelayanan Administrasi Kecam adalah sebesar 17 % hal ini menunjukkan sangat kurang.

Tabel 5
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
KANTOR KECAMATAN PAMEKASAN TAHUN 2010

N O	URAIAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET	HASIL PER- HITUNGAN
--------	--------	-----------------------	--------	------------------------

*Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung
terhadap Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Kecamatan Pamekasan*

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 357,440,000.,	Rp. 357,440,000.,	100 % (Efektif)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 61,477,400.,	Rp. 61,477,400.,	100 % (Efektif)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 25,500,000.,	Rp. 25,500,000.,	100 % (Efektif)
4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 13,200,000.,	Rp.13,200,000.,	100 % (Efektif)
5	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Rp 77,100,000.,	Rp. 77,100,000.,	100 % (Efektif)

Sumber : Kantor Kecamatan Pamekasan (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5 memberikan gambaran bahwa efektifitas penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%
5. Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%

Analisis penggunaan anggaran langsung dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Kontribusi belanja langsung adalah sumbangan dari penerimaan belanja langsung terhadap belanja total.

$$\text{Kontribusi belanja langsung} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = realisasi penerimaan belanja langsung.

Y = realisasi penerimaan total belanja

Tabel 6
KRITERIA KINERJA ANGGARAN

Prestasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10,00 %	Sangat kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Cukup
30,01 – 40,00 %	Sedang
40,01 – 50,00 %	Baik
> 50,01 %	Sangat baik

Tabel 6
KONTRIBUSI BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN KANTOR KECAMATAN PAMEKASAN TAHUN 2010

N O	URAIAN	BELANJA LANGSUNG (X)	TOTAL BELANJA (Y)	HASIL PER- HITUNGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 357,440,000.,	Rp. 684,412,400.,	52 % (Baik)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 61,477,400.,	Rp. 684,412,400.,	8,9 % (S. Kurang)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 25,500,000.,	Rp. 684,412,400.,	3,7 % (S. Kurang)
4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 13,200,000.,	Rp. 684,412,400.,	1,9 % (S. Kurang)
5	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Rp 77,100,000.,	Rp. 684,412,400.,	11 % (Kurang)

Sumber : Kantor Kecamatan Pamekasan (Data diolah)

Berdasarkan tabel 6 memberikan gambaran bahwa kontribusi belanja langsung terhadap total belanja anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 52 % hal ini menunjukkan baik
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 8,9 % hal ini menunjukkan sangat kurang
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 3,7 % hal ini menunjukkan sangat kurang
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah sebesar 1,9 % hal ini menunjukkan sangat kurang
5. Program Pelayanan Administrasi Kecam adalah sebesar 11 % hal ini menunjukkan sangat kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan rasio efektifitas penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2009 menunjukkan bahwa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Penataan Daerah Otonomi Baru dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%.

Kemudian perbandingan rasio efektifitas penggunaan anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2010 menunjukkan bahwa: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan dikatakan efektif sesuai dengan rasio efektifitas mencapai 100%

Selanjutnya kontribusi belanja langsung terhadap total belanja anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2009 sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 50 % hal ini menunjukkan baik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur adalah sebesar 26 % hal ini menunjukkan cukup, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 3 % hal ini menunjukkan sangat kurang, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah sebesar 2 % hal ini menunjukkan sangat kurang, Program Penataan Daerah Otonomi Baru adalah sebesar 0,5 % hal ini menunjukkan sangat kurang, Program Pelayanan Administrasi Kecam adalah sebesar 17 % hal ini menunjukkan sangat kurang

Kemudian kontribusi belanja langsung terhadap total belanja anggaran Kantor Kecamatan Pamekasan Tahun 2010 sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 52 % hal ini menunjukkan baik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 8,9 % hal ini menunjukkan sangat kurang, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 3,7 % hal ini menunjukkan sangat kurang, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah sebesar 1,9 % hal ini menunjukkan sangat kurang, Program Pelayanan Administrasi Kecam adalah sebesar 11 % hal ini menunjukkan sangat kurang

DAFTAR PUSTAKA

- Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, *Makalah Standar Analisa Belanja Dikaitkan dengan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
- Direktorat Jenderal Anggaran, Reformasi Sistem Penganggaran “konsep Dan Implementasi 2005-2007”, Jakarta, 2006
- Draft Revisi Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang *Pedoman* Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, *Penyusunan Penetapan Kinerja*, Jakarta 2005;

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik, Jakarta 2005;
- Kerja sama antara Setwilda Propinsi Jawa Tengah dengan PAU Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, *Executive Summary Standar Analisa Belanja Anggaran Daerah*.
- Lembaga Administrasi Negara, Keputusan Kepala LAN No 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Pemerintah (SAKIP) Dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik, Jakarta 2005;
- Pemerintah Republik Indonesia Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Pemerintah Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL);
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- Prihantoro, Purwono, *Pembangunan Daerah, Renstra dan Akuntabilitas (Pendekatan Public sector Balanced Scorecard)*, 2001.